

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah diwajibkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangannya untuk menghasilkan laporan keuangan sesuai prinsip tepat waktu serta standar akuntansi pemerintah berterima umum. Laporan keuangan yang berkualitas wajib disajikan oleh pemerintah sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap masyarakat (Lestari & Dewi, 2020).

Dalam rangka memenuhi kewajiban dalam menjalankan tugas pemerintahan sesuai ketentuan tentang keuangan negara, pemerintah daerah diwajibkan secara rutin menyampaikan laporan keuangan kepada pihak berwenang, mencakup pendapatan, belanja, dan posisi keuangan lainnya untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik, laporan keuangan harus jelas, lengkap, dan dapat dipahami oleh semua pihak.

Pemerintah daerah harus berusaha untuk meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan daerah agar tercipta tata kelola pemerintahan yang efektif. Keuangan pemerintah daerah menjadi akuntabel melalui penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dibuat oleh Kepala Unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang juga berperan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Setiap tahun, LKPD Kabupaten Rembang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) untuk menilai kualitasnya.

Hasil dari pemeriksaan ini dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana LKPD tersebut berkualitas. Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang telah mencatat kemajuan dalam hal pelaporan keuangan, yang dapat diamati dari perkembangan opini audit atas LKPD Kabupaten Rembang.

Mulai dari tahun 2012 hingga tahun 2017, pemerintah daerah Kabupaten Rembang memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tetapi, sejak tahun 2018 hingga 2022, pemerintah daerah Kabupaten Rembang telah meningkatkan progresnya sehingga opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berhasil diperoleh serta dapat mempertahankan opini audit tersebut selama lima tahun berturut-turut (<https://jateng.bpk.go.id/lhp-lkpd/>).

Dengan mempertimbangkan fenomena ini, peneliti bermaksud untuk meneliti pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang. Selain itu, peneliti juga ingin melihat apakah Sistem Pengendalian Internal (SPI) dapat berfungsi sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini.

Kualitas LKPD merupakan aspek pokok dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah serta memberikan informasi akurat yang dapat dipercaya bagi pemangku kepentingan. Menurut Indra Bastian (2010), kualitas laporan keuangan mencerminkan hasil dari suatu proses akuntansi yang hasil akhirnya berupa informasi yang bermanfaat dan berkualitas untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan, meliputi

masyarakat umum, pihak internal pemerintah, anggota legislatif, dan pegawai pemerintah, lembaga pengawas internal seperti BPK-RI, serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas LKMD agar memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah yaitu peneliti memfokuskan pada kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), serta Sistem Pengendalian Internal (SPI).

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor utama yang sangat dibutuhkan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Jika kompetensi SDM yang dimiliki berkualitas, maka laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih optimal, berkualitas, dan tepat waktu. Berdasarkan dari hasil penelitian Rahayu (2020) & Auliah (2022) menyatakan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil penelitian dari Pradana & Putri (2022) menunjukkan bahwa kompetensi SDM tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) merupakan bagian penting dalam mengontrol kinerja pemerintah melalui pelaporan. SAKD berkaitan erat dengan prosedur pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pelaporan akuntansi untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD periode tertentu, sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan di masa depan. Jika SAKD dijalankan sesuai ketentuan, maka LKPD yang dihasilkan akan berkualitas

baik. Berdasarkan dari hasil penelitian Yunindra (2020), dan Oktavia & Rahayu (2020) diperoleh bahwa SAKD memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan suatu *software* yang berperan membantu menjalankan proses pengelolaan keuangan daerah di tingkat OPD. Dengan adanya penerapan SIPKD yang efektif dapat mewujudkan laporan keuangan berkualitas baik. Penelitian ini didukung oleh Ariandi (2021) yang membuktikan bahwa penerapan SIPKD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Berbanding terbalik dengan Erawati, *et al.*, (2021) dan Utama (2021) yang membuktikan bahwa penerapan SIPKD tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) adalah rangkaian proses yang menjadi bagian penting dari tindakan yang diupayakan secara berkelanjutan oleh atasan dan semua pegawai dengan tujuan terwujudnya suatu keyakinan terhadap pencapaian sasaran organisasi melewati pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif, keakuratan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara serta kepatuhan dalam menjalankan aturan yang berlaku. Penelitian yang menggunakan SPI sebagai variabel moderasi diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nohong (2021) yang menyatakan bahwa SPI dapat memoderasi hubungan antara kompetensi SDM terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mardiyatul, *et al.*, (2019) menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) dapat berfungsi sebagai moderasi dalam hubungan antara Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, SPI tidak memiliki peran sebagai moderasi dalam hubungan antara kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, SPI dapat berfungsi sebagai moderasi dalam hubungan antara kompetensi SDM, SAKD, dan efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian Aprisyah & Yuliati (2021) yang berjudul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Dinas Perhubungan Kota Bengkulu). Kebaruan penelitian ini yang pertama adalah adanya penambahan satu variabel independen yaitu efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) serta penambahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagai variabel moderasi. Penambahan efektivitas penerapan SIPKD bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan SIPKD terhadap kualitas LKPD. Penambahan SPI sebagai variabel moderasi didasarkan kemampuan SPI mempengaruhi kontrol dan pengawasan. Sehingga SPI dapat memoderasi

untuk menentukan sejauh mana pengaruh kompetensi SDM, SAKD dan efektivitas penerapan SIPKD terhadap kualitas LKPD.

Kebaruan kedua, penelitian ini difokuskan pada kualitas LKPD Kabupaten Rembang. Dengan demikian, penelitian ini berperan dalam meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kualitas pelaporan keuangan di tingkat pemerintah daerah dengan lebih terperinci.

Kebaruan ketiga, penelitian sebelumnya menggunakan *software* SmartPLS untuk melakukan analisis jalur PLS-SEM. Namun, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *software* SPSS. Penggunaan *software* SPSS dapat memperluas cakupan analisis data dan memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap hubungan antar variabel dalam konteks penelitian ini, sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan mendalam terkait dengan model yang dikembangkan dan hasil analisis data.

Berdasarkan hasil ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, maka dengan menggunakan kasus di Kabupaten Rembang, peneliti bermaksud untuk meneliti pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), dan efektivitas penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang dengan Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebagai variabel moderasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang?
2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang?
3. Apakah efektivitas penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang?
4. Apakah kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal (SPI)?
5. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal (SPI)?
6. Apakah efektivitas penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal (SPI)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang.

2. Mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang.
3. Mengetahui pengaruh efektivitas penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang.
4. Mengetahui pengaruh kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal (SPI).
5. Mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal (SPI).
6. Mengetahui pengaruh efektivitas penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIPKD) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Rembang yang dimoderasi oleh Sistem Pengendalian Internal (SPI).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat signifikan bagi berbagai pihak, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman teoritis terkait hubungan antara SDM, SAKD, efektivitas penerapan SIPKD, SPI dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini

dapat memperluas pemahaman ilmu akuntansi serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak yang ingin melakukan pengembangan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD.

2. Secara praktis

- a. Bagi akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting pada akademisi dalam bidang akuntansi dan keuangan daerah serta dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai kualitas LKPD.
- b. Bagi penulis, penelitian ini merupakan tambahan wawasan dan pengetahuan terkait kualitas LKPD.
- c. Bagi pemerintah, diharapkan penelitian ini akan memberikan bantuan dalam mencapai kualitas keuangan yang lebih baik dan tingkat transparansi yang lebih tinggi di pemerintah daerah.
- d. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam melakukan analisis yang lebih baik terkait kredibilitas dan keberlanjutan kerja sama bagi perusahaan yang berhubungan dengan pemerintah daerah Kabupaten Rembang.
- e. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat membantu investor yang tertarik dengan Kabupaten Rembang dalam mengevaluasi risiko dan peluang investasi di Kabupaten Rembang.

E. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan yaitu membantu penulis dalam menyusun penelitian agar lebih terstruktur dan jelas, sehingga memudahkan

pembaca dalam memahami isi penelitian. Penjelasan singkat mengenai sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang deskripsi teoritis variabel penelitian, pengembangan hipotesis, tinjauan penelitian sebelumnya, dan kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi, sampel dan pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan pengukurannya, serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data. Dalam bab ini disajikan dan dijelaskan tentang analisis dan pembahasan atas hasil analisis dari hipotesis yang telah dikemukakan.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan peneliti bagi peneliti selanjutnya.